

ANALISIS KONFLIK MASYARAKAT
DENGAN PERHUTANI AKIBAT
PENGAMBILAN LAHAN KEHUTANAN DI
KABUPATEN DOMPU (Studi Kasus di
Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa
Kabupaten Dompus)

By YENDRI SAPUTRA

SKRIPSI

25
ANALISIS KONFLIK MASYARAKAT DENGAN PERHUTANI AKIBAT
PENGAMBILAN LAHAN KEHUTANAN DI KABUPATEN DOMPU
(Studi Kasus di Desa Soriutu Kecamatan Mangelewa Kabupaten Dompu)

ANALYSIS OF COMMUNITY CONFLICTS WITH PERHUTANI DUE TO
FORESTRY LAND TAKING IN DOMPU DISTRICT
(Case Study In Soriutu village Mangelewa Subdistrict Dompu Regency)



Oleh:

YENDRI SAPUTRA

NIM: 217110063

1
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2020-2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan yang luas. Hutan Indonesia tersebar di beberapa pulau besar, yaitu pulau Jawa, pulau Sumatera, dan pulau Kalimantan. Hutan dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu hutan lindung, dan hutan produksi. Hutan memiliki fungsi penting bagi kehidupan manusia. Menurut Kadri (Indriyanto, 2010, hlm. 6), pengertian hutan itu sendiri adalah “bidang yang dipenuhi pepohonan, sebagai suatu kesatuan, perpaduan antara alam hidup dan lingkungan alam atau ekosistemnya”.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan sosial tidak terlepas dari konflik. Konflik merupakan bagian dari perubahan sosial. Teori konflik Darendrov meyakini bahwa masyarakat selalu dalam perubahan, konflik dan konflik akan selalu terjadi dalam sistem sosial, dan berbagai elemen masyarakat akan menyebabkan disintegrasi dan perubahan (Ritzer dan Douglas, 2010). Teori ini menunjukkan bahwa konflik merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dan akan terus terjadi dalam kehidupan bermasyarakat (Nasikun dalam Nulhaqim, 2017:76).

Sebagai bagian dari perubahan sosial, konflik pada dasarnya merupakan cara untuk membentuk suatu tatanan/konsensus sosial dalam masyarakat. Tatanan yang ada dalam masyarakat ini seringkali datang dari pemaksaan penguasa terhadap anggota di bawahnya dengan menekankan peran kekuasaan dalam memelihara

ketertiban sosial. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dibentuk oleh konsensus dan konflik merupakan kebutuhan bagi orang lain.

Menurut De Dreu dan Gelfand (2007) dalam Putra (2013: 1), konflik adalah suatu proses ketika seorang individu atau kelompok merasakan adanya perbedaan atau pertentangan antara dirinya dengan individu atau kelompok lain dalam kepentingan dan sumber daya, keyakinan, nilai-nilai, atau aspek lain Waktu.Latihan. Berdasarkan definisi konflik tersebut dapat dipahami bahwa konflik terjadi baik pada tingkat individu maupun pada tingkat kelompok dalam masyarakat (Putra, 2014).

Menurut undang-undang Pasal 1 ayat 1. Nomor 7 Tahun 2012, tentang Penanganan Konflik Sosial, menjelaskan bahwa konflik sosial adalah perselisihan dan/atau konflik kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan memiliki jangkauan pengaruh yang luas serta berubah menjadi gejala dan /atau konflik kekerasan yang mengganggu stabilitas negara. Menghambat pembangunan nasional.

Konflik dalam masyarakat dapat bersifat nyata atau laten (Dahrendorf, 1956: 173). Konflik bersifat laten, yaitu jika individu atau kelompok yang terlibat konflik tidak menyadari bentuk kepentingan yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa orang sedang berkonflik, tetapi orang-orang ini tidak merasa bahwa mereka sedang mengalami konflik. Benturan yang jelas berarti bahwa bentuk benturan kepentingan yang telah terjadi telah dilakukan oleh individu atau kelompok yang berkonflik atau orang yang “berkonflik”.

⁴² Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, di desa Soriutu Kecamatan Manggelewa kabupaten Dompu, terdapat hutan lindung seluas 1073 hektar yang berisi pohon kijang mas, gaharu, beringin dan berbagai jenis pohon lainnya. Menurut pemaparan dari Pak Aidin selaku Kepala Desa Soriutu, pada awalnya masyarakat desa soriutu melakukan perabasan hutan tersebut untuk di jadikan lahan pertanian, tetapi bukan hanya masyarakat desa Soriutu saja yang melakukan perabasan di hutan Tawari tapi banyak masyarakat desa lain juga yang melakukan perabasan di hutan tersebut bahkan banyak masyarakat yang di luar kecamatan Manggelewa “Ungkap kepala desa Soriutu”. Hutan lindung (hutan tawari) tersebut berlokasi sebelah utara desa Tanjung kecamatan manggelewa yang berdekatan dengan kecamatan woja(bagian timur hutan Tawari)dan kecamatan kilo(bagian utara hutan tawari), yang membuat masyarakat desa soriutu melakukan perabasan hutan lindug tersebut dengan berbagai alasan yaitu, karena desakan ekonomi, kebutuhan pokok yang kurang dan banyak pengangguran.

¹⁷ Hampir semua aktivitas manusia melibatkan penggunaan lahan, karena jumlah dan aktivitas manusia meningkat pesat, menjadikan lahan sebagai sumber daya yang langka. Bahkan dalam keadaan yang kurang jelas, keputusan untuk mengubah pola penggunaan lahan dapat membawa keuntungan atau kerugian besar dalam hal aliansi ekonomi dan perubahan lingkungan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan penggunaan lahan merupakan aktivitas politik yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi.

Berdasarkan observasi awal, ditemukan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020 di kantor Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu terdapat

perjanjian antara Perum Perhutani Badan Kesatuan Pengolaan Hutan (BKPH) Toffo Pajo Soromandi Kecamatan Manggelewa dengan masyarakat Desa Soriutu hal ini terkait dengan pengelolaan konflik kepemilikan (kawasan pemanfaatan tanpa izin) yang menyita perhatian masyarakat. Menurut hasil kesepakatan, lokasi di Hutan Tawari yang terdiri dari 15 Petak Badan Kesatuan Pengolaan Hutan (BKPH) Toffo Pajo Soromandi harus kembali ke fungsi semula sehingga fungsi-fungsi hutan dari aspek ekologi, sosial, dan ekonomi dapat terjaga kelestariannya. Masyarakat yang menjadikan lahan pertanian kawasan hutan lindung tersebut harus secepatnya keluar dari kawasan hutan tawari. Perjanjian tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan pasal 1 no.4 yang diambil dari web resmi Badan Pengawasan dan Pembangunan yang tersedia dalam <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/6/581.bpkp> diakses pada pada hari Senin 17 November 2020 pukul 19.45 WIB. Memaparkan bahwasanya “hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.”

Kesepakatan antara masyarakat dengan Perhutani menimbulkan sengketa tersendiri bagi masyarakat. Masyarakat bingung mencari lahan pertanian dimana karena sudah mengandalkan ekonomi kawasan hutan lindung untuk mata pencahariannya. Masyarakat juga meminta kepada Perhutani untuk menyediakan lahan pertanian agar dapat digarap kembali, namun Perhutani tidak mampu

menyediakan lahan pertanian alternatif bagi masyarakat. Akhirnya, hingga saat ini, masyarakat masih bertani di kawasan hutan lindung.

Adanya perbedaan kepentingan antara Perhutani dengan masyarakat memunculkan pertentangan tersendiri. Terjadinya alih fungsi lahan tersebut menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemerintah yang berkepentingan untuk menjaga kelestarian kawasan hutan lindung dengan kepentingan ekonomi masyarakat.

Dari segi sosiologis, persoalan ini merupakan konflik antara masyarakat dengan Perhutani. Dilihat dari sumber konfliknya, konflik tersebut merupakan konflik vertikal. Maftuh (2008, hlm. 29) menjelaskan bahwa konflik vertikal adalah “konflik antara dua pihak yang berbeda status sosial”. Dalam penelitian ini akan terjadi konflik antar posisi sosial yang berbeda yaitu antara Perhutani dengan masyarakat, Perhutani memiliki kewenangan, sehingga statusnya lebih tinggi dari masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan Maftuh (2008, p.29), yang mengemukakan bahwa perbedaan status sosial meliputi “antara yang berkuasa dan yang tidak berkuasa, atau antara atasan dan bawahan”.

Konflik sosial tersebut di atas merupakan konflik yang nyata karena bersumber dari masyarakat dan ada pihak-pihak yang dirugikan. Kesepakatan yang dicapai dengan Perum Perhutani BKPH (Badan Pengelola Hutan) Toffo Pajo Soromandi mengecewakan dan mengkhawatirkan masyarakat, yang menjadikan kawasan hutan lindung sebagai kebutuhan hidup. Jika dibiarkan, konflik akan meningkat, dan kemungkinan konfrontasi tidak dapat dikesampingkan.

2
 Seperti yang dinyatakan Coser dalam Ritzer dan Goodman (2011, p.65), konflik nyata adalah konflik yang disebabkan oleh kekecewaan terhadap persyaratan khusus yang terjadi dalam hubungan dan perkiraan kemungkinan kepentingan peserta, dan ditunjukkan kepada objek pertimbangan untuk menjadi menjengkelkan.kecewa.

2
 Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang gambaran persoalan konflik yang ada di masyarakat Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu. Maka dari itu penulis akan melakukan sebuah penelitian dengan judul “Analisis Konflik Masyarakat dengan Perhutani 25 akibat Pengambilan Lahan Kehutanan Di Kabupaten Dompu (Studi Kasus di Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu).”

2 1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:. Bagaimanakah Konflik Masyarakat Desa Soriutu dengan Perhutani akibat Pengambilan Lahan Kehutanan Di Kabupaten Dompu

51 1.3 Tujuan penelitian

2
 Untuk mengetahui awal dari terjadinya Konflik Masyarakat Desa Soriutu dengan Perhutani akibat Pengambilan Lahan Kehutanan Di Kabupaten Dompu.

48 1.4 Manfaat Penelitian

Setiap kali penelitian dilakukan, pasti ada manfaatnya untuk menikmati hasil akhirnya. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi semua pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta dapat menjadi referensi tentang pentingnya hutan bagi kelestarian alam.

19 2. Manfaat praktis

Melalui penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai konflik antara masyarakat dengan Perhutani akibat penguasaan lahan hutan di Kabupaten Dompu.

3. Manfaat Lainnya

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata-1 Studi Manajemen Publik di Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Mataram.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan dengan keadaan yang berbeda, namun masih berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini dan dapat digunakan sebagai acuan dan pembanding untuk penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut dapat ditelaah sebagai berikut:

Pertama, Luqman (2013, hlm. 93) yang diambil dari skripsi program studi geografi FPIPS UPI tahun 2013 mengenai “Analisis Kerusakan Mangrove Akibat Aktivitas Penduduk di Pesisir kota Cirebon” Mengindikasikan bahwa alih fungsi lahan mangrove disebabkan oleh aktivitas warga sekitar yaitu pemukiman dan tambak, sehingga hutan mangrove menjadi rusak..

Kedua, . Kajian lainnya dilakukan oleh Rustandi (2013, hlm.102) yang diambil dari skripsi program studi geografi FPIPS UPI tahun 2013 mengenai “Dampak Konversi Lahan Terhadap Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung” Hal ini menunjukkan bahwa akibat alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi pemukiman telah terjadi alih fungsi lahan yang cukup besar di atas lahan seluas 407,1 hektar. Alih fungsi lahan ini telah mempengaruhi kondisi sosial masyarakat, sehingga lebih maju dan meningkatkan mata pencaharian..

Ketiga, Eko Edi Prastyo, Kliwon Hidayat2. (2016) melakukan penelitian tentang Pola Kemitraan Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat Desa Hutan. Menemukan bahwa program PKPH dijalankan oleh Perum Perhutani dan

masyarakat desa hutan Desa Kucur dengan berlandaskan kesepakatan perjanjian yang isinya menjelaskan pengelolaan hutan yang lestari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan aksesibilitas untuk masyarakat desa hutan yang ingin ikut PKPH dijalankan secara adil dan terbuka.

Keempat, Teguh Pramono, Rizki Yudha Bramantyo, Irham Rahman, Fitri Windrad (2019) melakukan penelitian tentang ¹ Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Kemitraan Di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. ¹⁶ Menemukan keberadaan hutan lindung dan hutan produksi di pemukiman masyarakat tetangga selalu penuh dengan ¹⁶ konflik. Konflik tersebut dapat berupa perusakan lingkungan, perusakan hutan, pencurian hasil hutan, atau bahkan terjadinya bencana alam. Melalui program kemitraan yang dilaksanakan Perhutani yang memberdayakan masyarakat sekitar hutan, Anda dapat meminimalisir bahkan menghilangkan konflik. Selain berbagai manfaat lain yang dirasakan oleh masyarakat.

Kelima, Muzain Abidin, Andi Chairil Ichsan, dan Indriyatno (2018) melakukan penelitian tentang ¹ Implementasi Kemitraan Kehutana Antara Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (BKPHL) Rinjani Barat Pelangan Tastura Dengan Masyarakat Desa Rempek Kabupaten Lombok Utara. Menemukan Bahwa proses implementasi kemitraan kehutanan dikatakan tinggi berdasarkan total nilai 7 yang diperoleh dari masing-masing pihak yang terlibat program kemitraan kehutanan.

² Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak lahan hutan yang telah dikonversi menjadi lahan komersial, salah satunya adalah lahan yang memenuhi

kebutuhan ekonomi masyarakat. Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan terus menerus, harus ada solusi.

1 Untuk lebih jelas dapat di petakan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1.
Pemetaan hasil penelitian terdahulu:

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil
1	Luqman 2013, hlm. 93	2 Analisis Kerusakan Mangrove Akibat Aktivitas Penduduk di Pesisir kota Cirebon	Hal ini menunjukkan bahwa alih fungsi lahan mangrove disebabkan oleh aktivitas warga sekitar yaitu pemukiman dan tambak, serta rusaknya hutan mangrove.
2	Rustandi 2013, hlm.102	2 Dampak Konversi Lahan Terhadap Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung	Hal ini menunjukkan bahwa akibat alih fungsi lahan yang terjadi ketika lahan pertanian digunakan untuk pemukiman, terjadi alih fungsi lahan yang cukup besar di area seluas 407,1 hektar. Alih fungsi lahan ini telah mempengaruhi kondisi sosial masyarakat, sehingga lebih maju dan meningkatkan mata pencaharian.
3	20 Eko Edi Prastyo, Kliwon Hidayat 2. 2016	Pola Kemitraan Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat Desa Hutan (Studi kasus program PKPH di desa kucur dau, kabupaten malang)	Program PKPH ternyata 19 alankan oleh masyarakat desa hutan di desa Perum Perhutani dan Kucur berdasarkan kesepakatan yang menjelaskan pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan.

Sumber: Luqman 2013, hlm. 93, Rustandi 2013, hlm.102, Eko Edi Prastyo,

Kliwon Hidayat2. 2016

Lanjutan **Tabel 2.1.** Pemetaan hasil penelitian terdahulu ¹⁵

			masyarakat. Sedangkan aksesibilitas untuk masyarakat desa hutan yang ingin ikut PKPH dijalankan secara adil ¹⁶ terbuka.
4	Teguh Pramono. Rizki Yudha Bramantyo. Irham Rahman. Fitri Windrad 2019	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Kemitraan Di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. (<i>Studi implementasi peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan. No.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Kemitraan Kehutanan</i>)	Keberadaan hutan lindung dan hutan produksi di dekat pemukiman masyarakat sarat dengan konflik. Konflik tersebut dapat berupa perusakan lingkungan, perusakan hutan, pencurian hasil hutan, atau bahkan terjadinya bencana alam. Melalui program kemitraan yang dilaksanakan Perhutani, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dapat meminimalisir bahkan menghilangkan konflik. Selain berbagai manfaat lain yang dirasakan masyarakat.
5	Muzain Abidin, Andi Chairil Ichsan, dan Indriyatno 2018	Implementasi Kemitraan Kehutanan Antara Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (BKPHL) Rinjani Barat Pelangan Tastura Dengan Masyarakat Desa Rempek Kabupaten Lombok Utara	Menemukan Bahwa proses implementasi kemitraan kehutanan dikatakan tinggi berdasarkan total nilai 7 yang diperoleh dari masing-masing pihak yang terlibat program kemitraan kehutanan

Sumber: Teguh Pramono. Rizki Yudha Bramantyo. Irham Rahman. Fitri Windrad

2019, Muzain Abidin, Andi Chairil Ichsan, dan Indriyatno 2018

18

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konflik

Analisa¹¹ dari konflik, dalam *International Encyclopaedia Of The Social Sciences* Vol. 3 (halaman 236) menjelaskan definisi konflik dari perspektif antropologi. Konflik disebabkan oleh persaingan antara setidaknya dua pihak, yang masing-masing dapat⁴⁶ berupa individu, keluarga, kelompok kerabat, komunitas, atau kelas sosial ideologis, organisasi politik, bangsa atau penganut agama tertentu. Oleh karena itu, pihak-pihak yang mungkin¹¹ terlibat dalam konflik mencakup berbagai bentuk dan skala. Lebih lanjut Mulyadi (2002) mengemukakan bahwa jika kita mencermati kehidupan sosial, komponen utamanya adalah interaksi antar anggota. Mengenai interaksi antar anggota, beberapa jenis telah ditemukan. Jenis umum interaksi sosial meliputi kerjasama, persaingan, dan perselisihan. Ketiga komponen ini akan saling terkait.

Di sisi lain, menurut Bambang Widodo Umar (2010), ada beberapa cara untuk menangani konflik sosial (gaya manajemen konflik), yaitu:

- a. Negosiasi kompromi (negosiasi) adalah⁴¹ cara penyelesaian konflik di mana tidak ada pihak yang menang atau kalah (metode *win-win* atau *losslose*). Pihak-pihak yang berkepentingan saling memberikan konsesi atau saling konsesi. Kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan tetapi tidak lengkap dan kalah tetapi tidak lengkap.

- b. Sesuaikan (puas diri), lunakkan (lembutkan), patuhi (puas diri). Metode ini adalah metode win-win. Konflik diredam dengan mengakomodir berbagai kepentingan orang-orang yang berkonflik, salah satu pihak melepaskan dan menyimpan apa yang diinginkannya, sehingga pihak lain dapat sepenuhnya memperoleh apa yang diinginkannya.
- c. Kerjasama atau *collaborating* melawan atau *confronting*. Kedua belah pihak bekerja sama untuk mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Metode ini adalah metode win-win. Dalam solusi ini, pihak-pihak yang berkonflik diundang ke meja perundingan untuk menyelesaikan masalah yang diperlukan.
- d. Menghindari atau *Avoidance*. Konflik di kendalikan dengan cara membatasi waktu atau membagi wilayah agar masing-masing kelompok tidak saling benturan satu sama lain dan agar bentrokan tidak semakin meluas atau *win-lose approach*.
- e. Bersaing atau *competing*, Menguasai atau *dominating*, memaksa (*forcing*). Cara ini merupakan pendekatan terhadap konflik yang berciri menang-kalah (*win-lose approach*). Cara ini dengan mengorbankan pribadi dan kepentingan pihak lain tetapi ada aturan permainannya, yakni dalam system kompetisi.

2.2.2 Hutan

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem, berupa sebidang tanah yang

mengandung sumber daya alam hayati, dan lingkungan alamnya yang didominasi oleh pepohonan dan tidak dapat dipisahkan.

Ada 4 unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu:

- a. Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan.
- b. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
- c. Unsur lingkungan.
- d. Unsur penempatan pemerintah.

Unsur pertama, kedua dan ketiga merupakan satu kesatuan kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. Pengertian hutan di sini mengikuti konsep hukum vertikal, karena bidang (tanah), pepohonan, flora dan fauna serta lingkungan merupakan satu kesatuan yang utuh. Keputusan pemerintah tentang hutan sangat penting, karena dengan keputusan pemerintah, keadaan hutan menjadi sangat kuat.

Adapun dua arti penting penempatan pemerintah tersebut, yaitu :

1. Membuat kawasan hutan yang tidak seluruhnya dibuka, ditempati atau dikerjakan secara sewenang-wenang. Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan wajib mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan pemanfaatan hutan, serta menjaga dan melindungi hutan sesuai dengan fungsinya.
2. Hutan memiliki fungsi ganda dan berperan penting dalam melindungi air dan tanah, menjaga suasana yang sehat, dan menjaga keanekaragaman hayati hewan dan tumbuhan. Kelestarian dan keberadaan hutan bergantung pada sejauh mana kita mengenali dan melindungi nilai-nilai ekologi, sosial

dan ekonominya. Manfaat ini harus dimasukkan dalam sistem neraca nasional yang digunakan untuk mengukur pilihan pembangunan (Yusuf et al., 2011). Pentingnya dan peran hutan memainkan peran yang cukup besar dalam pemeliharaan kualitas dan ketertiban lingkungan, serta dalam pengembangan ekonomi kerakyatan dan pendapatan pajak nasional. Oleh karena itu, pemanfaatan dan perlindungan sumber daya hutan harus dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat memelihara dan meningkatkan fungsi dan fungsi hutan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

2.2.3 Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pengelolaan kawasan hutan tidak terlepas dari persoalan pertanahan atau konflik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kebutuhan ekonomi, sosial, ekologi dan lahan pertanian. Karena rendahnya intensitas pengelolaan, pengamanan dan perlindungan, konflik dapat terjadi di kawasan hutan (Sylviani dan Hakim, 2014). Suryandari dan Sylvani (2010) juga menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan hutan yang buruk merupakan penyebab terjadinya konflik kawasan hutan, oleh karena itu diperlukan kelembagaan yang dapat mengelola kawasan hutan secara lestari. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dan mencapai kelestarian hutan.

Salah satu isi dasar pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah melaksanakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah

dalam pengelolaan sumber daya hutan. Kesatuan pengelolaan hutan (KPH) harus dirancang sesuai dengan kondisi tapak sehingga pengembangan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dapat mencapai pengelolaan hutan lestari (Supratman, 2008). Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan rangkaian proses perencanaan atau persiapan rancangan kawasan hutan, berdasarkan fungsi dan nama pokoknya, dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Kesatuan pengelolaan hutan (KPH) merupakan bagian dari penguatan sistem pengelolaan hutan nasional, provinsi, dan daerah. UMF didirikan untuk menyediakan platform bagi kegiatan pengelolaan hutan yang efisien dan berkelanjutan (Moyo et al., 2013). Pelaksanaan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menghadapi banyak permasalahan baik dari sisi sistem maupun masyarakat.

Isu kelembagaan meliputi kendala pemangku kepentingan, peraturan perundang-undangan, organisasi, dana, dan sumber daya manusia (SDM). Isu sosial lebih cenderung pada kebutuhan lahan masyarakat dan berbagai jenis tanaman yang akan dikembangkan di areal percontohan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (Alviya dan Suryandari, 2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang dibentuk oleh organisasi KPHP adalah faktor komunikasi, sumber daya dan birokrasi (Hamzah, 2014).

2.2.4 Penguasaan Lahan

Kelestarian hutan dan kehidupan ekonomi masyarakat Lincun merupakan dua isu penting (Mustofa, 2011). Masyarakat di sekitar hutan masih

berada dalam kemiskinan, serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan di bidang kehutanan dan kehutanan, yang merupakan kendala yang menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan dan perlindungan hutan (Ramadoan et al., 2013). Areal yang direklamasi oleh masyarakat untuk pemukiman dan pertanian menunjukkan bahwa kondisinya tidak mendukung kelestarian fungsi kawasan hutan (Sylviani dan Suryandari, 2013). Status ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sangat menentukan derajat penanaman masyarakat di dalam hutan. Luas lahan garapan di dalam hutan ditentukan oleh tekanan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Tekanan ekonomi menjadi pendorong bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keluarga melalui pertanian di hutan (Subarna, 2011).

2.2.5 Pengelolaan Hutan

Pengelolaan hutan adalah penggunaan cara dan teknik pengelolaan hutan pada saat melakukan kegiatan di kawasan hutan. Pengelolaan hutan lestari harus mencakup berbagai fungsi teknis, keuangan, personal, administratif dan kepemimpinan yang terkait dengan unsur-unsur pengelolaan (POAC).

Beberapa unsur manajemen tersebut yaitu:

- a. perencanaan (*Planning*) adalah kegiatan berkaitan dengan pemilihan alternatif, kebijakan, prosedur dan program sebagai bentuk usaha untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

- b. Pengorganisasian (*Organizing*) adalah suatu tindakan menggabungkan seluruh potensi dalam kelompok orang atau bagan organisasi untuk bekerja bersama-sama guna mencapai tujuan bersama baik pribadi maupun kelompok.
- c. Pelaksanaan (*actuating*) adalah implimentasi dari perencanaan dan pengorganisasian dimana seluruh komponen bekerja sama sesuai dengan bidang masing-masing untuk dapat mewujudkan tujuan.
- d. Pengawasan (*controlling*) merupakan pengendalian kegiatan dari proses perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan apakah semua kegiatan tersebut memberikan hasil yang efektif dan efisien. (Hasibuan, 2009).

2.2.6 Kerangka konsep penelitian

Kerangka penelitian ini dimulai dengan kondisi hutan di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, ketika kualitas dan kuantitas hutan dan hasil bumi semakin menurun. Penyebab penurunan tersebut adalah karena aktivitas ⁶ seperti penebangan liar, perambahan dan perubahan penggunaan lahan atau konversi menjadi lahan pertanian atau ladang jagung, dan semua pohon yang ada gundul. Penanaman liar yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan hutan secara berlebihan atau berlebihan menyebabkan kerusakan kawasan hutan yang serius. Bukan Amerika Serikat. ¹⁸ 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang ini menjadi dasar penyelenggaraan sektor kehutanan nasional. Selain itu, untuk mencapai kemakmuran yang lebih besar, seluruh hutan di ³⁵ Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, telah diatur oleh rakyat yang dikuasai oleh negara.

Maka dari itu Badan Kesatuan Pengolaan Hutan (BKPH) Toffo Pajo Soromandi dan masyarakat Desa Soriutu diharapkan mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan konflik. Penelitian konflik antara masyarakat dengan perhutani di kabupaten dompu ini dilakukan untuk melihat proses cara atau solusi dalam menyelesaikan konflik dan faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. ⁵³ Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah melalui metode kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan tidak dalam bentuk statistik, melainkan dari naskah wawancara, catatan lapangan, arsip pribadi dan dokumen resmi lainnya.

Menurut David William dalam Moleong (2006:5), ia menulis bahwa “penelitian kualitatif adalah penyelidikan yang menggunakan lingkungan alam, yang tujuannya adalah untuk menjelaskan apa yang terjadi, dan melibatkan berbagai metode yang ada.” Selain itu, menurut Moleong (2006:6) mengatakan, “Penelitian kualitatif adalah sejenis peneliti yang tujuannya untuk memahami fenomena yang dialami oleh objek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara holistik dan berupa kata-kata dan bahasa. Dalam konteks alami tertentu, berbagai metode alami digunakan untuk menggambarkan”. Melalui metode penelitian ini, penulis merasa mudah untuk diteliti, karena data yang dikumpulkan oleh penulis bukanlah data statistik.

Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2002:17), penelitian kualitatif adalah “penyelidikan yang lebih menekankan pada makna dan proses, pengungkapan lingkungan alam, dan digunakan sebagai sumber data langsung dari sumbernya sendiri. peneliti, sebagai alat kunci.” Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan konflik antara masyarakat dan Perhutani yang disebabkan oleh pendudukan hutan di Kabupaten Dompu, dan faktor pendukung

dan penghambat yang ditemukan untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat dan Perhutani. Menempati hutan di Kabupaten Dongpu.

¹³ Penelitian kualitatif ini tidak hanya mengungkapkan kejadian yang sebenarnya, tetapi hasil yang diharapkan juga akan ¹ mengungkapkan nilai yang tersembunyi. Selain itu, penyelidikan ini akan lebih sensitif. 18) “Penelitian deskriptif hanyalah informasi deskriptif kualitatif, berusaha menjaga keutuhan objek yang diselidiki secara relatif.

Menurut Faisal (2005: ¹² untuk melukiskan atau menggambarkan (*deskripsi*) Sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti”. Lebih Faisal (2005:20) menjelaskan bahwa “penelitian deskriptif dimaksudkan untuk explorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti”.

3.2 Lokasi dan waktu penelitian

⁶ Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu dan Badan Kesatuan Pengolaan Hutan (BKPH) Toffo Pajo Soro Mandi Kantor Resort Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu. Penelitian ¹² akan dilakukan pada bulan Januari sampai dengan selesai. Dipilihnya lokasi ini karena peneliti merasa mudah mendapatkan informasi yang lebih akurat, karena peneliti berasal langsung dari desa tempat penelitian dan termasuk pelaku juga dalam perabasan hutan tersebut.

3.3 Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berkaitan erat dengan faktor konseptual. Sehingga Anda bisa mendapatkan informasi atau data sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber yang ada. Tujuannya adalah untuk menentukan rincian yang ditemukan dalam konteks yang ada dan mengekstrak informasi sebanyak mungkin dari orang dalam untuk digunakan sebagai dasar untuk desain dan teori yang muncul.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknologi snowball sampling atau teknologi bola salju. Menurut Sutopo (2002: 370), “Survei dengan menggunakan teknologi snowball sampling adalah survei yang tidak direncanakan, penggalan informasi dari informan, kemudian ditunjukkan kepada informan kedua dan ketiga sampai dirasa informasi yang diperoleh lengkap dan mendalam”. Snowball sampling adalah untuk memperbaiki informasi yang ada, sehingga dalam proses pengumpulan data, peneliti tidak membatasi jumlah responden, dan lebih mengutamakan mereka yang memiliki pemahaman masalah yang detail.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pihak pengelola Badan Kesatuan Pengolaan Hutan (BKPH), Kepala Desa Soriutu dan masyarakat yang berada di Desa Soriutu, Kec. Manggelewa, Kab. Dompus, serta informan lain yang dianggap mempunyai hasil mendetil.

3.4 Jenis dan sumber data

3.4.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang di kumpulkan ada dua macam yaitu:

- a. Data Primer, Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:146) “Data asli adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya (bukan melalui cara perantara)”. Data utama penelitian ini adalah hasil wawancara langsung antara peneliti dengan orang dalam
- b. Data Sekunder, Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:147) adalah “sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”. Data tambahan termasuk surat kabar, undang-undang terkait layanan, daftar tamu, dll.

3.4.2 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, jenis sumber data yang diciptakan manusia dalam penelitian umumnya adalah responden (responden). Sebagai individu yang memiliki informasi, letak sumber data berupa orang (resource person) sangatlah penting. Peneliti dan nara sumber memiliki status yang sama di sini, sehingga nara sumber tidak hanya menjawab pertanyaan peneliti, tetapi juga dapat memilih untuk menyajikan arah dan cita rasa informasi yang mereka miliki (Sutopo, 2006 : 5758).

Menurut penelitian Flannery (1984: 47), sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen. Kata-kata dan perbuatan orang-orang yang diamati atau

diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau rekaman video/audio tape, foto atau film (Moleong, 2007:157). Peneliti berusaha untuk menyesuaikan bidang penelitian yang menjadi subjek penelitiannya. Peneliti mengumpulkan data secara induktif dan kumulatif, kemudian menghasilkan laporan yang lebih komprehensif. Laporan dibuat dengan mengelompokkan data serupa dan diberi kode terpisah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumen (pengumpulan bukti, seleksi, pengolahan, dan penyimpanan informasi).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data yang diperoleh secara lisan dan tertulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi terdiri dari pengumpulan data secara sadar dan sistematis dengan menggunakan prosedur yang baku (Suharsimi Arikunto, 2010: 265). Observasi adalah cara menerima data, yang dicapai dengan mengamati peristiwa dan mencatat secara sistematis fenomena yang dipelajari. Observasi tidak hanya menentukan orang yang diwawancarai, tetapi juga latar belakang, fakta, dan kesesnya.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan informasi, melalui pertanyaan dan jawaban lisan, tatap muka secara sepihak, dan dilakukan sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Sudijono (1996:82) memiliki beberapa kelebihan dalam pengumpulan data melalui wawancara, di antaranya pewawancara dapat langsung menghubungi partisipan yang dinilai, data yang diperoleh lebih mendalam, dan yang diwawancarai dapat mengungkapkan perasaan terdalamnya secara lebih luas. pertanyaan. jelas dapat diulang dan diselesaikan dengan cara yang lebih bermakna.

3. Dokumentasi

Arikunto (2002:206) Metode dokumen terdiri dari pencarian data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dll. Nawawi (2005: 133) mencatat bahwa penelitian kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data melalui warisan tertulis, terutama dalam bentuk arsip, termasuk buku-buku tentang pendapat dan argumen yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian.

17 3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2006:248), analisis data terdiri dari pengolahan data, pengorganisasian, pengkategorian menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mensintesisnya, menemukan dan menemukan pola, menemukan hal-hal penting, dan belajar Mencoba untuk membuat sesuatu terjadi. Dan memutuskan apa yang harus dikatakan kepada orang lain. Oleh karena itu, data yang terkumpul dari hasil wawancara dan penelitian kepustakaan atau dokumen dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maksud dan maknanya, kemudian dihubungkan dengan pertanyaan penelitian. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk narasi dan kutipan langsung dari hasil wawancara.

Sebagian program analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Milles dan Huberman (2000:1521), yaitu analisis interaktif. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan informasi dengan mewawancarai key insiders yang sesuai dengan penelitian, kemudian melakukan observasi langsung di lapangan untuk mendukung penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan sumber data yang diharapkan.
- b. Reduksi data adalah proses seleksi yang menitikberatkan pada penyederhanaan, transformasi data perkiraan yang dihasilkan oleh cacat lapangan selama proses penyelidikan, dan tujuannya adalah untuk melakukan transkripsi data (transformasi data) untuk memilih transformasi data yang sesuai dengan permasalahan. Terjadi di tengah adegan.

- c. Penyajian data (visualisasi data) adalah kegiatan mengumpulkan ¹ informasi dalam bentuk teks naratif dan tabel, yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman penelitian tentang informasi yang dipilih, kemudian disajikan dalam tabel atau deskripsi penjas. Penyajian atau visualisasi data dirancang untuk memudahkan peneliti melihat gambaran keseluruhan atau sebagian dari penelitian.
- d. Untuk mencapai suatu kesimpulan (verifikasi) adalah dengan mencari pola penjas, kemungkinan konfigurasi, jalur ¹ sebab akibat dan makna dari proposisi. Verifikasi dalam penelitian kualitatif telah dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian sejak memasuki lapangan. Selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan menemukan makna dari data yang terkumpul.

3.7 Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh dan memungkinkan adanya interpretasi hasil penelitian, ¹ maka perlu dilakukan triangulasi. Menurut Moleong (2011: 330), “Triangulasi adalah teknik untuk memverifikasi keabsahan data, yang menggunakan hal-hal lain selain data untuk memverifikasi atau membandingkan data”. Menurut Danzim dalam Moleong (2011: 330), “Keempat triangulasi adalah teknik yang menggunakan sumber, metode, peneliti dan teori untuk memverifikasi ³⁹ keabsahan data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dan font. Menurut Barton dalam Moleong (2011: 330), ⁷ triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari waktu ke waktu

dan kepercayaan dari alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Menurut sumber Moleong (2011:331), validitas data verifikasi dapat diperoleh melalui metode berikut:

12

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dan apa yang dikatakan orang secara pribadi.
- c. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
Dalam penelitian ini untuk mengecek keabsahan data, peneliti lebih memfokuskan kepada membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

27

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil desa soriutu

A. Sejarah Singkat Desa

Desa Soriutu adalah merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu NTB. Desa Soriutu terbentuk sejak tahun 1970, yang terdiri dari 4 Dusun dengan luas wilayah 3,71 Km². Kepala desa pertama adalah H. Baso, selanjutnya dipimpin oleh beberapa kepala desa lainya hingga saat ini Desa Soriutu dipimpin oleh Bpk. Aidin yang menjabat mulai tahun 2018-2023.

B. Demografi Desa Soriutu

Jumlah Penduduk Desa Soriutu adalah 4.165 Jiwa terdiri dari laki-laki 2.022 jiwa dan perempuan 2.165 jiwa.

5

Tabel 4.1.

Penduduk Desa Soriutu menurut kelompok umur dan Janis Kelamin

No	Umur / Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
1	0 – 4	161	137	298
2	5 – 9	152	147	299
3	10 – 14	151	176	327
4	15 – 19	152	174	326
5	20 – 24	150	160	310
6	25 – 29	164	158	322
7	30 – 34	158	167	325
8	35 – 39	174	159	333
9	40 – 44	137	150	287
10	45 – 49	149	164	313
11	50 – 54	122	146	268
12	55 – 59	108	117	225
13	60 – 64	105	97	202
14	65 – 69	86	93	179
15	70 – 74	55	58	113
16	75 +	39	36	75

Jumlah	2063	2139	4202
--------	------	------	------

Sumber: Kantor Desa Soriutu Data Sekunder (2021)

3 Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk usia 0 – 14 tahun dan penduduk usia produktif (15 s/d 55 tahun) .

C. Kondisi Desa

18 1. Batas Administrasi Desa

Desa Soriutu terletak di wilayah Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, yang berada di tengah-tengah Desa lain. Adapun batas-batas wilayah Desa Anamin adalah:

- Sebelah Utara : Desa Tanju
- Sebelah Selatan : Desa Anamina
- Sebelah Barat : Desa Doromelo
- Sebelah Timur : Desa Tekasire

Jika melihat tata letak Desa, sebenarnya cukup strategis karena tidak terlalu jauh dari ibukota kabupaten dan cukup potensial untuk pengembangan usaha pertanian, peternakan dan perikanan.

2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil pendataan oleh pemerintah desa pada tahun 2018 diperoleh data jumlah penduduk Desa Soriutu tercatat 4.202 jiwa terdiri dari 2.022 jiwa laki-laki, 2.180 jiwa perempuan. Bila dibandingkan antara jumlah penduduk dan luasan wilayah, maka dapat dikatakan bahwa Desa Soriutu adalah wilayah kategori padat.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Soriutu (KK) Tahun 2018

NO	Nama Dusun	Nama Kepala Dusun	Jumlah KK	Jumlah Jiwa		Jumlah Penduduk
				L	P	
1	Soriutu	Jainudin	111	184	183	367
2	Meci angi	Firman	103	181	186	367
3	Sigi	Ismail	86	165	187	352
4	Nggaroni`u	Sukardin	88	180	206	386
5	Manggelewa	Usman Karim	142	249	273	522
6	Samada	Jasman, S.Pd	179	322	350	672
7	Madalandi	Sirajudin	121	250	217	467
8	Sorilandi	Juraidin	98	164	172	336
9	Palia	M. Yasin	77	146	148	294
10	Ladia	HamidunAgus	117	222	217	439
Total			1122	2063	2139	4202

Sumber: Kantor Desa Soriutu Data Sekunder (2021)

3. Luas Wilayah dan Jarak Desa ke Kota Kecamatan dan Kabupaten.

Secara administratif, Desa Soriutu meliputi wilayah seluas 3,71 kilometer persegi. Desa Soriutu terdiri dari 10 desa yang masing-masing dikelola oleh seorang kepala desa. Desa-desa yang ada di Desa Soriutu adalah: Dusun Soriutu, Dusun Meci Angi, dan Dusun Sigi. Dusun Nggaroni`u, Dusun Manggelewa, Dusun Samada, Dusun Madalandi, Dusun Sorilandi, Dusun Palia dan Dusun Ladia, sedangkan jarak dari Pusat Desa Soriutu ke ibukota kabupaten adalah ± 3 kilometer, dan jarak ke Ibukota Kabupaten Dompu adalah ± 12 kilometer.

4. Topografi dan Iklim

Desa Soriutu merupakan area yang datar, sebagian berbatu, beriklim tropis, terbagi atas musim hujan dan kemarau dengan curah hujan ⁵ 144,29 mm/tahun dan suhu rata-rata.

5. Tata Guna Lahan

Wilayah desa Soriutu memiliki sungai di dusun-dusun kecil Sigi, Nggaroni`u, Ladia dan Dusun Sorilandi. Padahal, sumber daya manusianya sebagian besar adalah petani dan peternak. Padi dan tanaman kedua ditanam di sawah. Output tahunan hanya 12 kali. Juga, kondisinya sangat baik. Banyak orang beternak, namun usaha peternakan umumnya dilakukan dengan sistem Kardas (bagi hasil).

3 6. Hidrologi dan Tata Air

Air Permukaan air di Desa Soriutu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan air minum dari sumur bor dan Sanyo (air sumur). Pada musim kemarau, air sumur yang ada hanya dapat memenuhi kebutuhan ²⁰ masyarakat untuk minum, memasak, mandi dan mencuci, serta kebutuhan rumah tangga lainnya. membutuhkan. Sementara itu, air sungai masih dapat memenuhi kebutuhan air pertanian.

⁵ **Tabel 4.3**
Jenis Penggunaan Sumber daya air

No	Jenis Sumber Daya Air	Jumlah (Unit/KK)	Keterangan
1	Mata Air	2	1 Program Pamsimas
2	PDAM/perpipaan	1	PDAM Kab. Dompu

3	Sumur Bor	-	-
---	-----------	---	---

Sumber : Kantor Desa Soriutu Data sekunder (2021)

7. ⁵ Keadaan sosial

1. Tingkat Pendidikan

Seperti disebutkan di atas, salah satu kondisi kemiskinan di desa Soriutu adalah terkait dengan pendidikan. Berdasarkan hasil pendataan, ⁵ secara umum tingkat pendidikan masyarakat masih sangat rendah.

Dari hasil riste secara mendalam ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, Antara lain sebagai berikut:

- ⁵ a. Kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan masih kurang. Masih banyak orang tua yang lebih memilih anaknya membantu mencari ikan, bekerja di sawah, memelihara ternak, dan lain-lain. daripada membiarkan anak-anak mereka pergi ke sekolah.
- b. Pelayanan pendidik belum mencapai kondisi terbaik. Kemampuan guru terbatas, dan sebagian besar guru adalah guru honorer. Hal ini berdampak baik bagi siswa maupun orang tua.
- ⁵ c. Sarana dan prasarana untuk belajar mengajar juga dinilai masih kurang.
- d. Peran komite sekolah tidak berjalan.

Secara umum telah ada upaya untuk menjawab persoalan yang ada ini, misalnya di Desa Soriutu telah ada 2 buah SD, 1 buah SMP dan tidak memiliki lembaga pendidikan setingkat SMU/SMK masyarakat

menyekolahkan anaknya keluar Desa tetangga, ⁵ berkaitan dengan pendidikan keaksaraan dan penyadaran masyarakat serta telah terbentuk pendidikan anak usia dini (PAUD) 1 buah TK Pembina 3 buah PAUD, 2 diantaranya masih aktif 1 lagi pasif bersama guru-guru dari masyarakat sekitar. Dilihat dari kebutuhan sekolah (khususnya sekolah dasar dan literasi), ⁵ dapat dikatakan bahwa upaya yang telah dilakukan belumlah cukup dan masih perlu ditingkatkan, sehingga harus berkembang secara perlahan. Jika ini tercapai, keinginan bersama untuk meningkatkan fokus pembangunan Indeks Pembangunan Manusia di tingkat desa, jalan dan kabupaten pasti akan terwujud. ⁴ Lihat tabel di bawah ini untuk data tingkat pendidikan penduduk desa Soriutu:

³ **Tabel 4.4**
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Soriutu Tahun 2018

No.	Jenjang pendidikan	Jumlah (org)
1	Sarjana sederajat	346
2	SLTA Sederat	996
3	SLTP Sederat	533
4	SD sederajat	639
5	TK/PAUD	484
6	Tidak sekolah	1046
7	Belum sekolah	152

Sumber :Kantor Desa Soriutu Data sekunder (2021)

2. Sarana dan Prasarana Desa

Transportasi merupakan salah satu jenis penunjang yang dianggap sangat penting oleh masyarakat karena menyangkut seluruh ³ aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan dan kekeluargaan antar masyarakat.

Bahkan, masyarakat menganggap lalu lintas dan kondisi terkait lalu lintas sangat buruk. Berdasarkan data profil desa yang disusun pada tahun 2014 dan survei lapangan, diperoleh data dan informasi terkait infrastruktur transportasi berikut ini.

Dalam keseharian angkutan pedesaan roda empat hanya PP 2x sarana transportasi umum yang digunakan oleh masyarakat hanyalah ojek dan bis umum dengan ongkos yang masih terjangkau. Hubungan antar dusun terbuka dengan baik, kondisi jalan yang sudah baik ini juga akses masyarakat sudah lumayan baik

Tabel 4.5
Jenis Sarana Jalan

No.	Uraian	Jumlah Dalam Unit
1	Jalan propinsi	1
2	Jalan Kabupaten	1
3	Jalan antar Desa	2
4	Jalan ekonomi	5
5	Jalan lingkungan	12
6	Gang	20
7	Jembatan	1

Sumber : Data Sekunder Tahun (2018)

3. Kesehatan Sanitasi dan Air Bersih

Kesehatan merupakan modal dasar yang sangat vital dalam aktifitas kehidupan sehingga upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sangat di butuhkan. Berdasarkan diskusi dengan pihak kesehatan yang ada, Bidan Desa dan Puskesmas selama tahun 2018 belum ada kasus yang masuk walaupun ada masih berobat ringan dengan membeli obat di kios.

Kesehatan, sanitasi dan air minum Sarana dan prasarana kesehatan, sanitasi dan air minum masih sangat terbatas. Prasarana sanitasi yang ada di Desa Soriutu meliputi: 7 Posyandu. Sementara infrastruktur yang tersedia didukung oleh 13 tenaga medis (bidan desa), 3 bidan medis, dan 2 terapis tradisional yang terlatih. Kader desa juga mulai berkembang, namun gagal memainkan peran terbaiknya. Tentunya dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan, jumlah sarana dan prasarana yang ada masih jauh lebih sedikit. Selain itu, masih ada kekurangan obat-obatan yang tersedia untuk umum. Karena infrastruktur yang masih terbatas, Posyandu yang ada belum maksimal sebagai tempat pelayanan.

Begitu pula dengan penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi yang masih sangat langka. Di Desa Suolitu, berdasarkan hasil pendataan diketahui tidak semua sumur dapat dioperasikan sepanjang tahun, keberadaannya terkonsentrasi di sebagian kecil desa yang memilih lereng dan dataran rendah. Selain itu, beberapa orang telah mencoba membangun sumur, dan pasokan air bersih juga menjadi penyebab sedikitnya fasilitas air bersih.

Demikian juga dengan ketersediaan infrastruktur air minum dan sanitasi yang masih sangat langka. Di Desa Soriutu, menurut hasil pendataan, tidak semua sumur dapat beroperasi sepanjang tahun, keberadaannya terkonsentrasi di sejumlah dusun yang memilih lereng dan dataran rendah. Selain itu, ada juga upaya pembangunan sumur, dan

ketersediaan air minum juga menjadi penyebab sedikitnya fasilitas air minum.

Tabel 4.6
Jenis Sarana dan Prasaran Desa Tahun 2018

No.	Jenis sarana	Jumlah (unit)
1	Sumur gali	-
2	Jamban keluarga	150
3	Mata air	1
4	SPAL	4
5	Perpipaan	1
6	PDAM	1
5	Pustu Pembantu	-
8	Polindes	1
9	Posyandu	7
10	TK	1
11	SD	2
12	SMP/MTS	1
5	SMU/SMK	-
14	PAUD	3
15	Masjid	2
16	Musholah	5
17	TPQ	10

Sumber : Kantor Desa Soriutu Data sekunder Tahun (2015)

4. Pemukiman dan perumahan penduduk

Sebaran perumahan masyarakat sangat relatif, ada desa-desa kecil dengan rumah sejenis (berkelompok) dan ada desa-desa kecil dengan rumah yang berjauhan (terpencar). Sebagian besar instalasi penerangan di Desa Soliutu berupa listrik PLN, dan masih banyak masyarakat yang menggunakan lampu minyak di rumahnya. Listrik PLN ini sudah lama digunakan di desa Soriutu dan warga yang tidak memiliki dana untuk mendapatkan listrik.

Sebaran perumahan masyarakat sangat relatif, ada desa kecil yang rumahnya berdekatan (berkelompok) dan ada dusun yang rumahnya jauh (berpencar). Sebagian besar instalasi penerangan di Desa

Soriutu menggunakan listrik PLN, dan masih banyak masyarakat yang menggunakan lampu minyak di rumahnya. Listrik PLN ini sudah lama digunakan di desa Soriutu dan warga yang tidak memiliki dana untuk mendapatkan listrik.

8. Keadaan Ekonomi

1. Mata Pencaharian

Mata pencaharian utama penduduk Desa Soriutu adalah dari sektor pertanian. Selain bertani, masyarakat Soriutu bermata pencaharian sebagai pegawai negeri sipil, pedagang, bakul dan pendopo, tukang batu dan tukang kayu, peternak, dan perkebunan. Berikut ini adalah data mata pencaharian masyarakat di Desa Soriutu.

Tabel 4.7

Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Mata Pencaharia Pada Tahun 2018

Jumlah KK	Jenis Mata Pencaharian				
	PNS	Petani/peternak	Pedagang/wir aswasta	Nelayan	Buruh

Sumber : Data Sensus Tahun (2017)

2. Lembaga Keuangan Desa

Tabel 4.8

Lembaga Keuangan Mikro Desa

No	Nama Lembaga Keuangan	Jumlah	Keterangan
1	Koperasi	1	Tidak aktif
2	Bumdes	1	Belum Maksimal
3	Kelompok SPP		Aktif
4	Gapoktan	5	Aktif

Sumber : Kantor Desa Soriutu Data Sekunder (2021)

3. Pendapatan Perkapita

Menurut data profil desa dan survei desa yang telah dilakukan, sumber mata pencaharian utama masyarakat Soriutu adalah pertanian, peternakan dan perkebunan. Pendapatan rata-rata masyarakat berkisar antara Rs 400.000 hingga Rs 500.000 per bulan.

Perkembangan ekonomi Desa Soriutu masih lambat, terkait dengan belum adanya produk berkualitas tinggi yang dapat menarik investasi dari semua pihak. ⁵ Misalnya, di sektor pertanian, tidak ada produk unggulan yang bisa menjadi merek (pilar) desa. Meskipun potensi ketersediaan lahan pertanian cukup luas, masyarakat menghadapi kendala seperti sulitnya memperoleh air untuk irigasi. Kendala lain yang dihadapi sektor pertanian adalah kemampuan teknis masyarakat untuk mengendalikan hama masih terbatas.

Industri peternakan juga mengalami keterbatasan/masalah yang sama. Meskipun industri peternakan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, namun kemampuan masyarakat dalam pengendalian penyakit ternak masih kurang, dan perkembangan peternakan ³ yang ada juga lambat. Bahkan, banyak hewan yang diperdagangkan terpaksa dijual dengan harga murah.

Selain beberapa permasalahan tersebut di atas, permasalahan lain yang dihadapi masyarakat dalam segala jenis usaha yang dijalankannya adalah terkait ⁵ dengan pemasaran. Jika hasil perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan hanya dijual kepada masyarakat desa, maka nilai jualnya relatif murah. Namun, jika masyarakat berniat menjual di pasar luar desa, sebagian

hasil penjualan akan digunakan sebagai kerugian biaya transportasi. Jarak Desa Soriutu ke Pasar Kabupaten Dompu di ibu kota sebenarnya tidak terlalu jauh, transportasi yang dibutuhkan warga Desa Soriutu hanya 4.444 kendaraan umum. Berdasarkan hasil diskusi kunci dengan masyarakat, informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa menurut indikator lokal yang dirumuskan dan disepakati masyarakat, tingkat kebahagiaan keluarga dibagi menjadi tiga kategori yaitu miskin, sedang dan kaya.

Secara umum, ada sembilan standar yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan kategori tingkat kesejahteraan. Standar tersebut juga telah dirumuskan dan disepakati oleh masyarakat yaitu kondisi perumahan, kepemilikan ternak, kepemilikan sawah, pekerjaan, pendapatan, kendaraan, penerangan, fasilitas air minum, kepemilikan toilet. Dibandingkan dengan 8 standar yang ada, kondisi perumahan adalah yang paling penting, sehingga nilai bobot yang diberikan oleh masyarakat adalah 9, diikuti oleh kepemilikan ternak 8, kepemilikan tanah 7, pekerjaan 6, pendapatan 5, kepemilikan kendaraan 4, nilai penerangan 3. Air sarana bersuci 2. Kepemilikan toilet 1. Dari proses penggunaan alat penilaian klasifikasi kesejahteraan keluarga, diperoleh angka kemiskinan sebagai berikut:

Tabel 4.9
Prosentase Tingkat Kesejahteraan Keluarga Desa Soriutu dan Sebarannya
pada tahun 2018

No.	Nama Dusun	Jumlah KK	Klarifikasi Kesejahteraan Keluarga (%)			Total (%)
			Miskin	Sedang	Kaya	
1.	Soriutu	111	11	90	5	
2.	Meci angi	103	39	40	24	
3.	Sigi	86	20	60	5	
4.	Nggaroni'u	88	20	63	5	
5.	Manggelewa	142	27	99	15	
6.	Samada	179	36	100	43	
7.	Madalandi	121	40	76	5	
8.	Sorilandi	98	26	70	2	
9.	Palia	77	18	55	4	
10.	Ladia	117	28	79	11	
JUMLAH		1122	265	732	119	

Sumber :Kantor Desa Soriutu Data Sekunder (2021)

4.1.2 Profil Resort Soriutu BKPH Toffo Pajo Soromandi

Dasar

Resort soriutu terdiri dari wilayah kerja Balai BKPH Toffo Pajo Soromandi yg mempunyai luas kawasan hutan kurang lebih 5.199,17 Ha dengan 3 fungsi kawasan hutan yaitu, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan lindung.

1. Hutan produksi terbatas, Hutan jenis ini hanya boleh di eksploitasi dengan tebang pilih, peruntuknya pun hanya untuk memproduksi kayu dalam skala kecil.
2. Hutan produksi tetap, hutan ini dapat di eksploitasi secara menyeluruh dengan tebang habis, namun juga bisa tebang pilih.

- 23
3. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya terjaga kelestariannya, terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya.

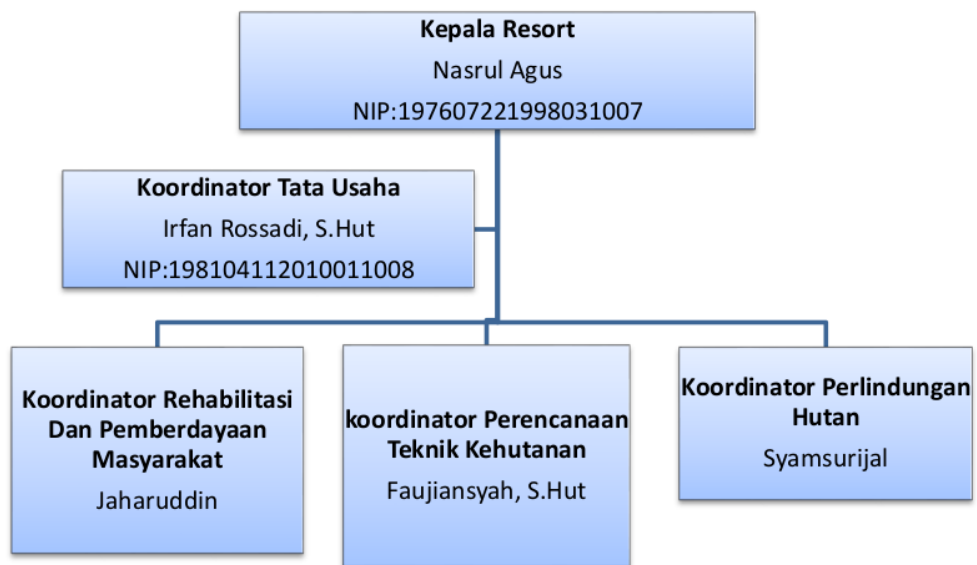
Bentuk Kelembagaan Kantor Resort Soritutu

18

Sesuai Permendagri No. 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP di Daerah. KPHL Toffo Pajo dibentuk menurut Tipe 43

A, terdiri dari :

1. Kepala Resort, Nasrul Agus
2. Koordinator Tata Usaha, Irfan Rossadi, S.Hut
3. Staf Tata Usaha, Isramayana
4. Koordinator Perencanaan Teknik Kehutanan, Faujiansyah, S.Hut
5. Koordinator Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Jaharuddin
6. Koordinator Perlindungan Hutan, Syamsurijal

STRUKTUR ORGANISASI RESORT SORIUTU

Sumber: BKPH Toffo Pajo Soromandi Kantor Resort Soriutu (2021)

Tata Letak

Titik sentral Resort soriutu terletak di Desa Tekasire jl. lintas sumbawa Kec.Manggelewa Kab.Dompu. Batas timur wilayah perbatasan antara kec.manggelewa dan kec.woja, Batas Barat desa soriutu, batas selatan hutan produksi dan Batas Utara Jalan lintas sumbawa.

Menurut wilayah administrasi wilayah pengawasan resort soriutu meliputi 6 desa yaitu:

1. Desa madaprama
2. Desa tekasire
3. Desa soriutu
4. Desa tanju
5. Desa taropo
6. Desa mbuju

Keadaan Hidrologi Wilayah

Kabupaten Dompu tergolong daerah yang memiliki banyak sungai yaitu 124 sungai yang biasa digunakan untuk mengairi lahan pertanian. Pada musim hujan drainase cukup besar, tetapi pada musim kemarau akan berkurang hingga tersisa 25% atau sebagian besar sungai kering (tidak ada air). Kabupaten Dompu memiliki 37 mata air potensial, tersebar di Jalan Hu`u, 6 mata air, terletak di Jalan Dompu 6, Jalan Kempo 17, Jalan Kilo, 8 buah.

Klimatologi Wilayah

Keadaan iklim suatu daerah dapat dilihat dari keadaan curah hujan, hari hujan, suhu, kelembaban relatif, kecepatan angin dan intensitas sinar matahari. Sementara itu, untuk menggambarkan kondisi cuaca di suatu wilayah tertentu dengan wilayah yang sempit, Anda dapat mengamati curah hujan dan kondisi hujan yang terjadi di wilayah tersebut. Seperti daerah tropis lainnya, Kabupaten Dongpu hanya memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim hujan rata-rata dari Oktober hingga April. Dari Oktober hingga Maret, angin bertiup dari barat daya ke timur laut disertai hujan. Pada musim kemarau suhunya relatif rendah yaitu 20-30°C pada siang hari dan 20°C pada malam hari.

Tipe iklim Kabupaten Dompu adalah D, E dan F. Suhu rata-rata bervariasi antara 22,5 ° dan 31,4 ° C. Suhu rata-rata maksimum 32,2 ° C dan suhu minimum 21,2 ° C. Suhu tertinggi dihasilkan pada 1: 00 WIB dan suhu terendah pada pukul 05:00 WITA. Rata-rata kondisi kelembaban relatif pada siang dan malam hari selama penelitian adalah 60% sampai 95%. Tekanan atmosfer rata-rata harian memiliki fluktuasi dua kali lipat dari tekanan atmosfer maksimum, sekitar pukul 09:00 dan 23:00, dan fluktuasi minimum dua kali lipat waktu setempat sekitar pukul 17:00 dan 04:00 . Tekanan udara rata-rata bervariasi antara 1009,4 mb dan 1013,1 mb.

Topografi Wilayah

Medan daerah dapat ditampilkan dengan kondisi medan daerah tersebut, dapat dilihat menurut ketinggian dari permukaan laut dan kemiringan lereng. Medan Kabupaten Dompu berkisar antara 0 meter hingga 500 meter. Pada ketinggian yang berbeda, bentuk tanah yang terbentuk mulai dari dataran hingga perbukitan.

Klasifikasi lereng di Kabupaten Dompu bervariasi dari lereng datar, landai, curam, dan sangat curam.

Kondisi Terkini

Tahun Anggaran 2019 BKPH Toffo Pajo Soromandi mendapatkan alokasi anggaran APBD Perubahan Kabupaten Dompu sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh Lima Juta Rupiah) yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan orientasi lapangan, Sosialisasi satu kali, koordinasi serta studi pada BKPH yang telah melaksanakan peran dan fungsi pengelolaan hutan, Penyediaan aturan pelaksana BKPH, Penyediaan alat kerja minimal serta Alat Tulis Kantor (ATK).

BKPH Toffo Pajo Soromandi cukup mendapat dukungan luas dari masyarakat yang berasal dari kalangan tokoh masyarakat, LSM, Pers maupun elemen masyarakat lainnya.

Hasil orientasi lapangan menunjukkan wilayah-wilayah rawan gangguan keamanan hutan seperti :

1. Illegal Logging : Desa Soriutu dan Desa Tanju

2. Perladangan Liar : Desa Soriutu, Desa Tanju, Desa Taropo, Desa Mbuju dan Desa Tekasire

Upaya-upaya penanganan melalui kegiatan persuasif dengan melakukan dialog ataupun diskusi informal terhadap tokoh serta masyarakat yang berpotensi melakukan kegiatan gangguan keamanan hutan.

Kondisi yang diinginkan

Tahun anggaran 2020 prioritas ⁴⁵ adalah penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), pemenuhan sarana prasarana BKPH (Kantor, alat mobilitas dan sarana kantor), Diklat aparatur BKPH, Perlindungan dan Pengamanan Hutan serta Penguatan/pembentukan lembaga masyarakat.

Target Tahun 2020

1. RPHJP tersusun dan disahkan
2. Kantor dan sarana pendukung tersedia
3. Keamanan hutan kondusif
4. Terbentuk lembaga BKPH yang stabil
5. Terbentuk lembaga masyarakat calon mitra BKPH
6. Penyiapan kegiatan tahun 2021

4.2 Konflik Masyarakat Desa Soriutu Dengan Perhutani Akibat Pengambilan Lahan Kehutanan Di Kabupaten Dompu

Lahan digunakan masyarakat petani khususnya masyarakat Desa Soriutu untuk menanam berbagai jenis tanaman diantaranya jagung, padi, kacang hijau, umbi-umbian, cabai maupun tanaman sayur. Tentu hal tersebut dilakukan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, lahan merupakan cerminan status sosial dalam masyarakat agraris, semakin luas lahan yang dimiliki maka semakin tinggi status sosial seseorang dalam masyarakat. Begitu berharganya lahan sehingga seringkali menimbulkan konflik, baik yang bersifat individual maupun konflik antar kelompok tidak terkecuali konflik masyarakat tani Desa Soriutu dengan pihak kehutanan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dibidang tersebut. Konflik pertanahan seringkali mengakibatkan hilangnya mata pencaharian kelompok masyarakat desa Soriutu yang mengandalkan pertanian.

Penolakan besar-besaran dari petani menimbulkan protes dan tidak adanya tanah untuk di jadikan lahan garapan mengakibatkan kesengsaraan bagi petani Desa Soriutu.

Dari hasil survei yang dilakukan oleh peneliti dilapangan tepatnya Desa Soriutu Kecamatan Mangglewa Kabupaten Dompu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik antara masyarakat dengan kehutanan antara lain :

1. Karena terpaksa.

Konflik masyarakat dan kehutanan karena keterpaksaan masalah kurangnya lapangan pekerjaan sehingga masyarakat terpaksa melakukan konflik dengan pihak kehutanan demi mempertahankan lahan pertanian untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya, dan untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat.

2. Kekurangan lahan garapan.

Lahan unkr menenam semua jenis tanaman tidak mencukupi.. Penanaman semacam ⁶ ini merupakan rangkaian hubungan sebab akibat, yaitu keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi lahan garapan semakin berkurang, dan bahkan tanah tempatnya berada. terletak tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga, mengakibatkan penderitaan keluarga, jumlah tanggungan keluarga meningkat.

3. Keinginan menguasai lahan :

Banyak orang ⁶ ingin menguasai tanah garapan sebagai tempat penanaman dan ingin menetapkan hak milik. Konflik memanfaatkan lahan antara masyarakat Desa Soriutu lebih khususnya petani dan pihak kehutanan terjadi karena perubahan yang sangat signifikan yang awalnya hutan Blantara yang dikategorikan sebagai hutan negara (HTN) saat ini kondisinya sangat memprihatinkan menjadi lahan untuk penanaman komoditi jagung, padi, kacang hijau, umbi-umbian dan sayuran. Tentu hal itu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tani ⁴ sebagai sumber kehidupannya, tradisi bertani sudah sekian lama dipertahankan oleh masyarakat Desa Soriutu untuk bertahan hidup. Keberadaan pihak kehutanan yang kerap kali melakukan operasi gabungan dengan instansi lain untuk melindungi hutan dari ancaman yang dapat merusak keberadaan hutan itu sendiri. Namun disini lain reaksi perlawanan masyarakat ⁴ telah menciptakan benih-benih perlawanan dari

kelompok masyarakat Desa Soriutu yang terpisah dari alat produksinya dan menjadi syarat munculnya kekuatan yang berlawanan terhadap pola produksi yang diciptakannya sendiri.

Sebagaimana disebutkan di atas, faktor sosial ekonomi masyarakat merupakan faktor yang mendukung berkembangnya kesadaran kolektif, dan kesadaran kolektif merupakan dasar terbentuknya kelompok masyarakat yang menentang kehutanan. Sejak masuknya operasi gabungan yang diprakarsai oleh dinas kehutanan merupakan hal yang harus dihadapi oleh masyarakat Desa Soriutu dengan perjuangan bersama kelompok masyarakat tani yang menjadikan hutan so tawari wilayah Toffo Pajo Soromandi menjadi perbedaan atau pertentangan antar masyarakat dengan pihak kehutanan yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan yang sering kali menimbulkan korban. Korban tersebut baik dari pihak masyarakat maupun dari pihak kehutanan melakukan aksi pengejaran terhadap masyarakat yang menguasai lahan tersebut.

Pematokan area lahan, dan pengalihan fungsi hutan menjadi lahan pertanian disertai kegagalan pembibitan lahan merupakan bentuk protes petani guna memperoleh kembali lahan mereka. Sampai ditahun 2020 menjadi puncak perlawanan masyarakat Desa Soriutu sehingga dalam perjalanan perlawanan petani membentuk sebuah forum yang mereka sebut “kelompok tani tawari jaya”.

Faktor penyebab konflik termasuk masyarakat Desa Soriutu dengan pihak kehutanan sangat beragam yaitu: Perbedaan individu, perbedaan budaya, perbedaan

kepentingan dan perubahan sosial. Selain itu, faktor hukum, pendidikan, sosial dan ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya konflik pembebasan lahan di Desa Soriutu.

1. Pak Aidin selaku Kepala Desa Soriutu

“Pada awalnya masyarakat desa soriutu melakukan perabasan hutan tersebut untuk di jadikan lahan pertanian, tetapi bukan hanya masyarakat desa soriutu saja yang melakukan perabasan di Hutan Tawari tapi banyak masyarakat desa lain juga yang melakukan perabasan di hutan tersebut bahkan banyak masyarakat yang di luar kecamatan Manggelewa”. (Wawancara pada hari selasa, 02 Februari 2021. 08.00 Wita.)

2. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang kepala kehutanan resort Soriutu Badan Kesatuan Pengolaan Hutan (BKPH), Kepala Resort, Nasrul Agus memberikan penjelasan bahwa:

“Pihak kehutanan menginginkan masyarakat yang menjadikan lahan pertanian jagung di kawasan hutan lindung harus secepatnya keluar dari kawasan hutan So Tawari, karena hutan yang sudah di babat harus di kembalikan ke fungsi semula sehingga fungsi-fungsi hutan dari aspek ekologi, sosial dan ekonomi dapat terjaga kelestariannya”. (Wawancara pada hari kamis, 04 Februari 2021. 08.30 Wita.)

3. Pak Lalu Selamat, Kabid bina usaha kehutanan

“Setelah lahan yang ingin digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan bertani menjadi sasaran operasi gabungan dinas kehutanan dan pihak-pihak terkait diadakan, sebagian lahan tersebut ditinggal begitu saja karena alasan takut adanya penangkapan oleh pihak kehutanan setempat”. (Wawancara pada hari kamis, 04 Februari 2021. 09.00 Wita.)

4. Koordinator Perencanaan Teknik Kehutanan, Faujiansyah, S.Hut

Sumber utama kegiatan masyarakat seperti masyarakat tani semakin menyempit. Keselamatan dan keamanan yang tidak proporsional telah memaksa masyarakat yang dulunya bekerja sebagai petani kehilangan pekerjaan, yang berdampak pada ketimpangan ekonomi dan sosial mereka. Keterlibatan berbagai departemen pemerintah, termasuk aktor lokal, untuk mengkomunikasikan kebutuhan pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat dapat menyerahkan tanahnya kepada pemerintah. (Wawancara pada hari kamis, 04 februari 2021. 09.30 Wita.)

5. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Soriotu

26
mengungkapkan bahwa

“banyak masyarakat yang terpaksa meninggalkan kampung halamannya untuk mencari nafkah di daerah lain diakibatkan tidak ada lagi lahan yang dapat dijadikan sebagai lahan bertani dan berkebun”.

(Wawancara pada hari rabu, 03 februari 2021. 08.30 Wita.)

6. Koordinator Perlindungan Hutan, Syamsurijal

4
“Resesi antar masyarakat tidak terlepas dari ketimpangan ekonomi dan sosial, namun masyarakat juga harus kehilangan budaya lokal yang merupakan ciri ritual budaya nenek moyang mereka ketika penanaman. Masyarakat sudah begitu lama menunggu untuk menggarap lahan mereka, yang berdampak besar pada aspek ekonomi masyarakat dan kesenjangan sosial, yang dapat memicu kejahatan”. (Wawancara pada hari kamis, 04 februari 2021. 10.00 Wita.)

7. Tokoh masyarakat Sahrul Haidim

“Upaya masyarakat melakukan perlawanan dengan membentuk kelompok-kelompok untuk melakukan aksi-aksi untuk menarik perhatian pemerintah, berbagai gerakan masyarakat ini memiliki harapan masing-masing, dengan harapan dapat terjalin upaya komunikasi yang konstruktif antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini terlihat dari upaya masyarakat untuk bertemu dengan pemerintah untuk berunding dan mencapai kesepakatan. Upaya perlawanan kaum tani dapat dijelaskan setidaknya dalam dua cara: yang pertama adalah perlawanan sehari-hari dalam pengertian kita yang biasa dan yang kedua adalah perlawanan langsung, yaitu studi tentang dunia politik kaum tani dan kelas pekerja”. (Wawancara pada hari rabu, 03 februari 2021. 09.00 Wita.)

8. Keterangan tokoh masyarakat Desa Soriotu Robys Darwis memaparkan bahwa

4
“Misalnya, dalam perlawanan pertama terjadi proses yang tenang dan setengah-setengah di mana para petani ilegal menggerogoti lahan. Dalam pertempuran lain, tanah secara terang-terangan menyerbu tanah dan secara terang-terangan menentang monopoli tuan tanah. Nasib bersama dan pengalaman perjuangan memberi mereka kesadaran kolektif. Konflik yang sedang berlangsung dan belum terselesaikan antara masyarakat dan kehutanan membuat masyarakat mengembangkan pengetahuan dan praktik tempur sampai mereka menyadari bahwa sebuah organisasi akan menjadi alat baru di hutan. Perjuangan masyarakat”.

(Wawancara pada hari rabu, 03 februari 2021. 10.00 Wita.)

Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik⁴ Sengketa atau konflik merupakan fenomena hukum umum yang dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, karena sengketa atau konflik tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebagai fenomena hukum melalui kegiatan penyelesaian, setiap perselisihan atau konflik harus diselesaikan, dan tidak akan ada perselisihan tanpa penyelesaian. Menyelesaikan perselisihan atau konflik dalam kondisi masyarakat yang sederhana, dan ketika hubungan keluarga dan kelompok masih kuat, lembaga yang menyelesaikan perselisihan atau konflik memilih untuk menasar lembaga kerakyatan dalam bentuk musyawarah.

Menyelesaikan perselisihan atau konflik melalui negosiasi dan menahan diri dari tindakan kekerasan. Penyelesaian sengketa atau konflik saat ini cenderung individualistis, berorientasi pasar, dan seringkali diselesaikan melalui lembaga hukum nasional. Penyelesaian dengan cara tradisional dan melalui model negosiasi⁴ prioritas akan membuat kedua belah pihak yang bersengketa atau berkonflik merasa hanya karena tidak akan menjadi korban, karena kedua belah pihak akan memberikan solusi terbaik atas sengketa dan konflik yang muncul. Semua pihak berusaha untuk menyelesaikan konflik dalam pembangunan lahan dan konflik kehutanan intensif antara masyarakat untuk mencapai keadilan antara kedua belah pihak. Baik litigasi maupun non-litigasi memberikan berbagai solusi penyelesaian sengketa tanah, namun dalam banyak kasus, hasilnya tidak memuaskan.

Upaya untuk menyelesaikan konflik masyarakat dengan kehutanan antara lain:

1. Upaya Preventif (pencegahan)

⁶ Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Dalam buku petunjuk pelaksanaan, PHBM merupakan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan bersama dengan jiwa berbagi antara BKPH Toffo Pajo soromandi ⁶ Kecamatan Manggelewa, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlangsungan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.

¹⁴ Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumber daya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional. Tujuan Program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) yaitu :

- a. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat.
- b. Meningkatkan peran dan tanggung jawab kehutanan Kecamatan Manggelewa, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya hutan.
- c. Meningkatkan mutu sumber daya hutan, produktivitas dan keamanan hutan.
- d. Mendorong dan menyelamatkan pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah dan sesuai kondisi dinamika sosial masyarakat desa Soritu.

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Badan Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Toffo Pajo Soromandi ditunjukkan meminimalisir angka kerusakan hutan karena faktor manusia serta meningkatkan kesejahteraan desa hutan dengan penanaman jiwa berbagi.

2. Upaya Persuasif (penyampaian informasi)

Sebelum Terjadinya operasi gabungan yang dilakukan oleh dinas kehutanan Kabupaten Dompu terhadap masyarakat yang melakukan perladangan didalam kawasan hutan, harus ada penyelidikan dan penyampaian informasi yang jelas / spesifik supaya operasi yang di realisasikan oleh instansi yang terkait tidak sia-sia dalam memberantas kegiatan ilegal logging atau perladangan ilegal logging.

3. Upaya Represif (Tindakan tegas)

Operasi gabungan yang dilakukan antara pihak kehutanan Kabupaten Dompu dengan Polsek dan Polres yang mengedepankan fungsi represif diantaranya adalah melakukan tindakan operasi pengejaran masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap petugas kehutanan. Selain itu tindakan operasi juga dilakukan terhadap masyarakat yang mencuri kayu di wilayah kawasan hutan produksi (HP).

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pihak kehutanan menjadi bentuk intimidasi kehidupan bagi kedua belah pihak.. Konflik itu berupa klaim masyarakat tani atas penggunaan lahan kehutanan, masyarakat memiliki alasan hak berupa Hak yang di amanatkan oleh UUD 1945 bahwa masyarakat mengandalkan penggunaan tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Selain itu mereka menganggap bahwa tanah telah dimiliki secara turun-temurun. Aksi-aksi yang terjadi diantaranya masyarakat kerap kali menghadang aparat kehutanan yang sedang melaksanakan tugas. Status kepemilikan hak penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian masih dianggap ilegal tentu hal tersebut menjadi salah satu faktor pemicu konflik antara masyarakat tani dengan pihak kehutanan setempat.

Selain itu faktor sosial dan ekonomi yaitu, terlihat dari ketidak pedulian pihak pemerintah setempat terhadap masyarakat tani sekitar dari aspek sosial yang berimbas pada aspek ekonomi. Penyelesaian konflik antara masyarakat tani dengan kehutanan dilakukan melalui proses mediasi oleh pemerintah desa maupun daerah melalui forum-forum diskusi dan pertemuan yang melibatkan kedua belah pihak (petani dan kehutanan serta pihak lain yang memiliki kepentingan yang sama baik eksekutif, legislatif dan yudikatif).

5.2 Saran-Saran

Adapun saran peneliti⁴ berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan ialah:

1. Seharusnya proses perubahan peruntukan lahan dilakukan lebih baik seperti apa yang di jelaskan oleh pihak kehutanan, sehingga masyarakat tani sebagai pengguna tanah merasa telah aman dan legal dari pemerintah.
2. Selain itu adanya⁴ peralihan di peruntukkan penggunaan lahan tersebut harus jelas dan disosialisasikan kepada masyarakat dan seharusnya pembebasan lahan dilakukan secara transparan.
3. Pihak kehutanan pro aktif berkoordinasi dan berkerja sama dengan pemerintah desa (Kepala Desa) dan masyarakat setempat seperti pembentukan Kelompok Tani agar masyarakat bisa tertib dan mengelola di Hutan Produksi Tetap maupun di Hutan Produksi Terbatas sehingga masyarakat merasa aman dan legal untuk mengelola hutan tersebut.

Alviya, I., dan Suryandari, E.Y., (2008). Kajian Konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Way Terusan Register 47 Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. 5(2):101-120.

6 Arianto, (2008), *Mengelola Lahan Kehutanan Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta

Afifudin, (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT CV Pustaka Setia Bandung.

Aryadi, (2004). *Ekologi Hutan*. Bumi Aksara, Jakarta.

1 Candra, (2020). Implementasi Kemitraan Kehutanan Antara Kelompok Tani Dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPLH) Ampang Riwo Kab. Dompu (studi kasus di serakapi, Kec. WojaKab. Dompu). Hal.6-35.

Ciencos, S., (2002). *International Ency Clopedia Of The Sosial*.

6 Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 2003. *Kebakaran Hutan Menurut Fungsi Hutan, Lima Tahun Terakhir*. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Jakarta.

Dove, M.R., (1998). *Sistem Perladangan di Indonesia*. Suatu studi kasus dari Kalimantan Barat. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 510 hal.

6 Gunawan, (2014). *Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktek*. Penerbit Bumi Aksara Jakarta.

Geertz. Clifford, *agricultural involution : the proses of ecological change in Indonesia*. Berkeley : University of catifotnia press, .1963

1 Hasibuan, S. P. M., (2009). *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta; Bumi Aksara. Hal. 262.

H. B. Sutomo, (2002) *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta; UNS Press.

19 Inson, Doyle Paul, (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid II*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.

1 Lofland, John. Lofland. H., (1984). *Analizing Social Setting. California*; Wadsworth Publishing Company.

Maftuh, B., (2008). *Pendidikan Resolusi Konflik*. Bandung; CV Yasmelo Multi Aspek.

Moleong dan J Lexy, (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, (2002). “*Multikultural dan Kulturalisme*” dalam *Jurnal Humaniura Volume XIV NC.no.3/2002*

Mustafa, M.S., (2011). Perilaku Masyarakat Desa Hutan Dalam Memanfaatkan Lahan Dibawah Tegakan. *Jurnal Komunitas*. 3(1):1-11.

Ritzer, George dan Douglas J. Goolman, (2011). *Teori Sosiologi Modern Edisi Ke-6 Penyadur Alimandan*. Jakarta; Kencana.

Supratman, (2008). Desain Model Pembangunan KesatuanbPengelolaan Hutan (KPH) di Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Parennial*. 5 (1): 36-44.

Suryandari, E. Y., Dan Syani, (2020). Peran dan Koordinasi Para Pihak Dalam Pengelolaan KPH. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 7 (3): 227-246.

Sylviani dan Hakim, I., (2014). Analisis Tenurial dalam Pengembangan Kesatuan Pengelaan Hutan (KPH); (*Studi Kasus KPH Gedong Wani, Provinsi Lampung, Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*).11 (4): 309-322.

Wirawan. (2010). *Konflik dan manajemen konflik*. Jakarta: Salemba Humanika.

Sumber lain:

.Luqman (2013, hlm. 93) Analisis Kerusakan Mangrove Akibat Aktivitas Penduduk di Pesisir kota Cirebon.

Rustandi (2013, hlm.102) Dampak Konversi Lahan Terhadap Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Edi Prastyo, Kliwon Hidayat2. (2016) Pola Kemitraan Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat Desa Hutan.

Teguh Pramono, Rizki Yudha Bramantyo, Irham Rahman, Fitri Windrad (2019)¹
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Kemitraan Di
Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.

Muzain Abidin, Andi Chairil Ihsan, dan Indriyatno (2018) melakukan penelitian
tentang¹ Implementasi Kemitraan Kehutana Antara Balai Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung (BKPHL) Rinjani Barat Pelangan Tastura
Dengan Masyarakat Desa Rempek Kabupaten Lombok Utara.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ANALISIS KONFLIK MASYARAKAT DENGAN PERHUTANI AKIBAT PENGAMBILAN LAHAN KEHUTANAN DI KABUPATEN DOMPU (Studi Kasus di Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus)

ORIGINALITY REPORT

50%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.ummat.ac.id Internet	697 words — 7%
2	repository.upi.edu Internet	632 words — 6%
3	gerung.lombokbaratkab.go.id Internet	556 words — 5%
4	repository.unhas.ac.id Internet	400 words — 4%
5	eprints.umm.ac.id Internet	365 words — 3%
6	untb.ac.id Internet	316 words — 3%
7	adoc.pub Internet	230 words — 2%
8	id.scribd.com Internet	223 words — 2%

9	digilib.unila.ac.id Internet	196 words — 2%
10	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet	191 words — 2%
11	journal.uny.ac.id Internet	179 words — 2%
12	journal.ummat.ac.id Internet	162 words — 2%
13	denihasri.blogspot.com Internet	159 words — 1%
14	lib.unnes.ac.id Internet	94 words — 1%
15	id.123dok.com Internet	88 words — 1%
16	Teguh Pramono, Rizki Yudha Bramantyo, Gentur Cahyo Setiono, Suwadji Suwadji. "PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KEMITRAAN PERHUTANI DI KECAMATAN NGANCAR KABUPATEN KEDIRI (Studi Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Kemitraan Kehutanan)", <i>Transparansi Hukum</i> , 2019 Crossref	70 words — 1%
17	text-id.123dok.com Internet	69 words — 1%
18	es.scribd.com Internet	67 words — 1%

19	docobook.com Internet	66 words — 1%
20	repository.ub.ac.id Internet	48 words — < 1%
21	eprints.radenfatah.ac.id Internet	46 words — < 1%
22	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	45 words — < 1%
23	blog.unnes.ac.id Internet	35 words — < 1%
24	ejournal.undip.ac.id Internet	35 words — < 1%
25	123dok.com Internet	29 words — < 1%
26	core.ac.uk Internet	27 words — < 1%
27	eprints.undip.ac.id Internet	26 words — < 1%
28	eprints.unram.ac.id Internet	22 words — < 1%
29	etheses.uin-malang.ac.id Internet	20 words — < 1%
30	wanaswara.com Internet	20 words — < 1%
31	docplayer.info	

Internet

19 words — < 1%

32 journal.unhas.ac.id
Internet

18 words — < 1%

33 repository.its.ac.id
Internet

16 words — < 1%

34 www.itto.int
Internet

12 words — < 1%

35 www.jdih.alorkab.go.id
Internet

12 words — < 1%

36 www.slideshare.net
Internet

12 words — < 1%

37 Reza Ahmad Zahid. "Aktualisasi Komitmen Beragama Waria Kota Kediri", *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 2020
Crossref

11 words — < 1%

38 downloadily.com
Internet

11 words — < 1%

39 repository.stiedewantara.ac.id
Internet

11 words — < 1%

40 jurnal.untad.ac.id
Internet

10 words — < 1%

41 fr.scribd.com
Internet

9 words — < 1%

42 kolokiumkpmipb.wordpress.com
Internet

9 words — < 1%

43	pt.scribd.com Internet	9 words — < 1%
44	Colfer C.J.P., Capistrano D., eds.. "Politik desentralisasi: hutan, kekuasaan dan rakyat", Center for International Forestry Research (CIFOR), 2006 Crossref	8 words — < 1%
45	fmulakitan.files.wordpress.com Internet	8 words — < 1%
46	www.scribd.com Internet	8 words — < 1%
47	yogadharmabali.wordpress.com Internet	8 words — < 1%
48	Goodwill Desember 2013. "Goodwill Vo. 4 No. 2 Desember 2013", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2014 Crossref	6 words — < 1%
49	Mustamin H. Idris, M. Ulfatul Akbar, Fauzy As Syafiq. "Implementasi Pengoperasian Bus Trans Mataram Metro Di Kota Mataram (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Kota Mataram)", JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 2019 Crossref	6 words — < 1%
50	eprints.walisongo.ac.id Internet	6 words — < 1%
51	johannessimatupang.wordpress.com Internet	6 words — < 1%
52	kebudayaan.kemdikbud.go.id Internet	6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF

EXCLUDE MATCHES OFF